

PERAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DALAM MENDORONG PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN YANG BERKEADILAN DI DESA SAMPALI

Tawarika M. Pandiangan¹, Julia Ivanna², Alissa P. Simbolon³, Rahmi Siregar⁴

Email: pandiangentawarika@gmail.com¹, juliaivanna@unimed.ac.id², alissaputrisimbolon@gmail.com³, rahmisiregar955@gmail.com⁴

Universitas Negeri Medan

Abstrak: Perempuan memiliki pengalaman empirik yang signifikan dalam mengelola aspek ekonomi rumah tangga, merespons dinamika harga kebutuhan pokok, serta memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi dan pendidikan anak sebagai bagian dari peran domestik yang dijalankan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Sensitivitas ini menjadikan perempuan aktor penting dalam merespons kebijakan publik. Penelitian ini menganalisis peran PKK dalam mendorong partisipasi politik perempuan di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, studi literatur, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan PKK masih bersifat rutin dan administratif, belum mendorong kesadaran kritis maupun keterlibatan strategis perempuan. Oleh karena itu, transformasi peran PKK diperlukan melalui pelatihan kepemimpinan, sosialisasi politik, dan pemanfaatan media sosial agar perempuan dapat terlibat aktif sebagai subjek dalam proses pembangunan dan pengambilan kebijakan di tingkat desa.

Kata Kunci: Kaum Perempuan, Partisipasi Politik, Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

PENDAHULUAN

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau disingkat dengan PKK menjadi hal lazim terdengar dalam lingkungan masyarakat baik di Kota maupun Desa. PKK adalah sebagai gerakan nasional dibawah naungan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 36 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yakni Pasal 1 Ayat 7 menyatakan PKK adalah organisasi kemasyarakatan dibawah naungan Pemerintah agar dilakukan kegiatan pemberdayaan pola pikir hingga menghasilkan perilaku masyarakat semakin cerdas dalam bertindak berdasarkan batasan hak yang semestinya dimiliki dan melaksanakan kewajiban sebagai masyarakat dan hal ini berkontribusi pada dorongan pembangunan suatu Desa.

Hidup dalam negara Demokrasi, peran dan fungsi PKK seharusnya sebagai bagian dari ruang demokrasi untuk masyarakat melalui penerimaan partisipasi aktif masyarakat termasuk partisipasi kaum perempuan. Kiprah Perempuan dipercaya lebih mendominasi untuk menggerakkan PKK, bukan berarti menutup peran kaum pria. Kaum pria dapat bergabung dalam PKK jika memiliki etika feminis. Etika feminis menjadi panggilan etis untuk menghidupkan peran PKK agar menjadi lebih kental menyentuh langsung persoalan nyata yang terjadi dalam masyarakat terutama kehidupan keluarga yang dibangun masyarakat dan menjadi bagian integral menyatakan pembangunan sebuah Desa. (Maharani, Nugraha, & Pratama, 2024).

Peran perempuan sebagai simbol "Ibu Pertiwi" mengandung makna filosofis yang mendalam dalam membentuk tatanan keluarga yang sejahtera. Dalam kerangka pemikiran ini, perempuan tidak hanya diposisikan sebagai entitas biologis atau sosial, melainkan sebagai subjek rasional yang mampu memahami dinamika kehidupan keluarga secara menyeluruh. Kemampuannya dalam meresapi dan mengelola relasi interpersonal, memaknai kebutuhan emosional dan material anggota keluarga, serta merancang strategi solutif melalui pertimbangan rasional menunjukkan kapasitasnya sebagai agen moral dan

intelektual. Namun, dominasi konstruksi sosial yang menetapkan perempuan sebagai pengasuh anak dan pengelola urusan domestik sering kali mereduksi potensi kritis dan emansipatorisnya. Sementara laki-laki dikonstruksikan sebagai tulang punggung keluarga dalam makna ekonomi, hal ini telah menciptakan dikotomi peran yang tidak sepenuhnya adil. (Lestari, 2016).

Keadilan gender mensyaratkan adanya pengakuan terhadap peran perempuan sebagai subjek etis dan epistemik, yakni sebagai individu yang tidak hanya mengetahui persoalan dapur dan pengasuhan, tetapi juga sebagai perancang nilai-nilai keluarga berdasarkan pengalaman eksistensial dan pertimbangan rasional. Dengan demikian, spirit pemberdayaan perempuan dalam keluarga tidak semata-mata bertolak dari kewajiban tradisional yang diatribusikan kepadanya, melainkan dari kesadaran reflektif atas keberadaannya sebagai pelaku utama dalam reproduksi nilai-nilai kebijaksanaan, keadilan, dan kesejahteraan dalam ruang domestik maupun publik. (Muslikhati, 2004).

Dalam konteks ini, gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tidak hanya berfungsi sebagai instrumen peningkatan kualitas hidup keluarga dari sisi ekonomi dan sosial, tetapi juga sebagai medium pembentukan kesadaran kritis perempuan atas perannya dalam ruang publik. (Susanti, Siagian & Siregar, 2023). PKK menjadi wahana transformatif bahwa perempuan tidak hanya diasah secara teknis dan manajerial, tetapi juga diposisikan sebagai pelaku aktif dalam proses pembangunan berkelanjutan. Berangkat dari berbagai program seperti pendidikan keluarga, penguatan ekonomi berbasis rumah tangga, dan pelatihan kepemimpinan komunitas, perempuan mengalami proses transendensi dari peran domestik menuju partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan sosial-politik. Dengan kata lain, keterlibatan perempuan dalam PKK merupakan bentuk praksis kebajikan (*virtue ethics*).

Partisipasi politik perempuan tidak lahir dari ruang kosong, tetapi tumbuh dari pengalaman konkret dalam mengelola kebutuhan dasar keluarga dan komunitas. Ketika perempuan mampu merefleksikan dan mentransformasikan pengalaman tersebut ke dalam diskursus publik dan politik, maka kaum perempuan sedang menjalankan fungsi deliberatif dalam demokrasi menjadi warga negara yang memiliki suara dan kuasa untuk menentukan arah kebijakan. Dengan demikian, peran perempuan dalam PKK merupakan fondasi penting bagi terwujudnya partisipasi politik yang inklusif dan berkeadilan. PKK tidak hanya memberdayakan perempuan dalam ranah domestik, tetapi juga membuka ruang bagi kaum perempuan untuk hadir sebagai subjek politik yang tidak hanya memelihara kehidupan, tetapi juga memperjuangkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan dalam tatanan negara. (Aprilia, 2022).

Desa Sampali, yang terletak di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dipilih secara rasional sebagai lokasi penelitian berdasarkan pertimbangan metodologis yang mengandalkan data primer. Pemilihan lokasi ini dilatarbelakangi oleh temuan awal yang menunjukkan adanya persoalan terkait peran organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam mendorong eksistensi partisipasi politik perempuan di tingkat lokal. Berdasarkan hasil analisis terhadap data primer, ditemukan bahwa rendahnya tingkat partisipasi politik perempuan di Desa Sampali bukan disebabkan oleh hambatan struktural atau otoritarianisme yang berasal dari internal organisasi PKK. Sebaliknya, minimnya partisipasi tersebut lebih disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran perempuan terhadap pentingnya kekuatan politik sebagai instrumen perubahan sosial yang adil sebagaimana diungkapkan dari hasil wawancara dengan Ketua PKK. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam pemahaman perempuan mengenai peran politik sebagai bagian dari hak dasar dan ekspresi diri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- Bagaimana representasi budaya Indonesia Timur dalam film drama komedi 'Kaka Boss' menurut persepsi penonton?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana representasi budaya Indonesia Timur dalam film drama komedi "Kaka Boss" menurut persepsi penonton.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yakni jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan fenomena sosial secara mendalam berdasarkan perspektif subjek yang diteliti melalui pemahaman makna, pola interaksi, proses sosial, dan konteks kultural dari suatu peristiwa atau gejala. Dengan mengandalkan data primer yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan Ketua PKK Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada tanggal 22 Mei 2025. Selain itu, data sekunder yang kredibel telah digunakan pada penelitian ini guna memperkuat analisis dan memberikan konteks yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti, meliputi dokumen resmi, artikel jurnal, buku, literatur akademik, dan sumber lain yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyajikan gambaran yang utuh dan valid mengenai peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam mendorong partisipasi politik perempuan di Desa Sampali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua PKK Desa Sampali, terungkap bahwa PKK memiliki peran strategis dalam membuka ruang partisipasi politik bagi perempuan di tingkat desa. Keterlibatan tersebut dipandang sebagai kontribusi nyata PKK dalam mendorong pembangunan berbasis partisipasi komunitas. Perempuan, melalui struktur PKK, tidak hanya berperan sebagai pelaksana program, tetapi juga sebagai subjek yang aktif dalam menyuarakan kebutuhan dan kepentingan kolektif.

Namun, terdapat temuan menarik yang mengindikasikan adanya ketimpangan dalam dukungan dari aktor politik formal. Meskipun organisasi PKK di Desa Sampali telah menunjukkan inisiatif yang kuat dalam memberdayakan perempuan, dukungan dari kalangan politisi, khususnya wakil rakyat perempuan, belum sepenuhnya terwujud dalam bentuk keterlibatan konkret. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara representasi politik formal dengan gerakan perempuan di akar rumput, yang semestinya dapat bersinergi untuk memperkuat peran serta politik perempuan secara substantif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan diketahui bahwa Tim Penggerak PKK setempat telah menjalankan berbagai mekanisme untuk mendorong partisipasi politik perempuan melalui kegiatan pemberdayaan dan penguatan kapasitas. Mekanisme tersebut disusun secara sistematis dan disesuaikan dengan karakteristik sosial-kultural masyarakat desa. Tahap awal yang dilakukan oleh PKK adalah pendataan partisipatif terhadap potensi dan hambatan yang dihadapi oleh perempuan dalam berpartisipasi di ruang publik. Pendataan ini mencakup informasi mengenai keterlibatan perempuan dalam kegiatan organisasi desa, akses terhadap informasi politik, serta persepsi terhadap peran perempuan dalam pengambilan keputusan. Temuan menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan di Desa Sampali memiliki minat terhadap kegiatan sosial, namun masih menghadapi keterbatasan dari segi pengetahuan politik, keberanian menyuarakan pendapat, dan dukungan lingkungan sekitar.

Sebagai tindak lanjut dari hasil identifikasi tersebut, PKK Desa Sampali mengadakan sejumlah kegiatan edukatif seperti penyuluhan dan sosialisasi mengenai pentingnya partisipasi perempuan dalam pembangunan dan pengambilan keputusan desa. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran kritis serta memperluas pemahaman mengenai hak-hak politik perempuan. Selain itu, pelatihan peningkatan kapasitas juga diselenggarakan

secara berkala, mencakup penguatan keterampilan berbicara di depan umum, teknik negosiasi, serta pemahaman dasar mengenai sistem pemerintahan desa. Menariknya, PKK Desa Sampali juga mulai memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan informasi kegiatan, membagikan materi pelatihan, serta menjalin komunikasi yang lebih terbuka antara kader dan anggota masyarakat. Pemanfaatan media sosial ini terbukti efektif dalam menjangkau kelompok perempuan muda yang lebih akrab dengan teknologi digital.

Selain kegiatan teknis, PKK juga berperan sebagai fasilitator dalam mengarahkan perempuan agar dapat terlibat secara langsung dalam forum-forum pengambilan keputusan di tingkat desa, seperti Musyawarah Desa dan kegiatan perencanaan pembangunan. Meskipun partisipasi formal perempuan dalam forum tersebut masih terbatas secara kuantitatif, terdapat peningkatan secara kualitatif dari segi keberanian untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat. PKK juga membina kerja sama dengan organisasi perempuan lokal dan tokoh masyarakat guna membangun jaringan sosial yang lebih solid. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran PKK di Desa Sampali tidak hanya berfokus pada pelaksanaan program rutin, tetapi telah mengarah pada upaya pemberdayaan transformatif yang menciptakan ruang partisipatif dan mendorong kesetaraan gender dalam konteks pembangunan desa.

Partisipasi politik perempuan dalam kegiatan PKK di Desa Sampali masih belum menunjukkan keterlibatan yang optimal dan substantif. Kegiatan yang umum dijalankan, seperti posyandu, gotong royong, dan arisan, meskipun mencerminkan peran aktif dalam kehidupan sosial, belum sepenuhnya mengarah pada penguatan kapasitas perempuan dalam bidang politik. Aktivitas tersebut lebih bersifat rutinitas administratif dan cenderung mengikuti pola kebijakan dari pemerintah tanpa adanya ruang inisiatif yang dapat mendorong lahirnya program-program pemberdayaan yang bersifat transformatif. Dengan kata lain, keterlibatan perempuan dalam PKK masih bersifat prosedural dan belum melampaui batas-batas peran tradisional yang selama ini dilekatkan pada perempuan.

Partisipasi politik perempuan yang belum berakar pada kesadaran reflektif dan kritis sangat relevan jika dikaitkan dengan perkembangan gagasan feminisme yang telah membuka ruang bagi perempuan untuk menjadi subjek hukum dan mendapatkan suara dalam berbagai ranah sosial-politik. Feminisme tidak sekadar memperjuangkan kesetaraan gender dalam ranah formal, tetapi juga menuntut transformasi struktur sosial yang selama ini menempatkan perempuan sebagai objek atau pelengkap. Dengan demikian, peningkatan partisipasi perempuan dalam konteks PKK seharusnya diarahkan pada kesadaran akan hak dan kapasitas sebagai subjek aktif dalam pembangunan, bukan hanya sekadar keterlibatan administratif yang bersifat simbolik. Lebih jauh, perjuangan feminis mengingatkan bahwa keadilan sosial harus diraih tidak hanya oleh perempuan, tetapi juga oleh seluruh kelompok marginal yang mengalami penindasan sistemik. Hal ini menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan dalam konteks politik dan sosial bukanlah upaya yang terisolasi, melainkan bagian dari proses inklusif yang memerlukan dukungan lintas kelompok, termasuk laki-laki.

Dalam hal ini, konsep laki-laki feminis menjadi sangat penting sebagai panggilan etis. Laki-laki tidak harus secara harfiah menjadi feminis, namun dengan mengadopsi prinsip-prinsip feminisme seperti kepedulian dan keadilan, laki-laki dapat menjadi agen perubahan yang mendukung penguatan peran perempuan dan mendorong terciptanya keseimbangan kekuasaan. Keterlibatan aktif laki-laki yang menginternalisasi nilai-nilai feminisme dalam lingkungan sosial, khususnya di organisasi kemasyarakatan seperti PKK, berperan penting dalam memperkuat sinergi gender serta menciptakan suasana partisipasi yang inklusif dan berkeadilan. Dukungan dari laki-laki yang menghayati nilai-nilai feminis akan membantu mengatasi hambatan struktural dan budaya yang selama ini membatasi ruang gerak perempuan dalam politik. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan perempuan dalam PKK perlu didukung oleh pemahaman bersama yang kritis terhadap nilai-nilai keadilan gender, yang melampaui sekadar peran tradisional dan administratif, menuju transformasi sosial

yang lebih adil dan egaliter. (Rokhmansyah, 2016).

Kondisi tersebut mencerminkan bahwa partisipasi perempuan belum dilandasi oleh kesadaran yang reflektif dan kritis terhadap peran strategis perempuan dalam proses pembangunan. Ketika perempuan hanya dilibatkan sebagai pelaksana program tanpa diberikan ruang untuk menyusun agenda, menyuarakan kepentingan, atau mengambil keputusan, maka partisipasi tersebut tidak memberikan daya pengaruh terhadap perubahan sosial yang lebih luas. Padahal, dalam tataran ideal, partisipasi politik bukan sekadar keterlibatan dalam aktivitas yang telah ditentukan, melainkan juga mencakup kemampuan untuk memahami, menilai, dan secara aktif mengarahkan kebijakan yang menyentuh kepentingan komunitas.

Oleh karena itu, PKK diharapkan tidak hanya menjadi sarana pelaksanaan program teknis, tetapi berkembang sebagai wadah dialog sosial yang mendorong pertumbuhan kesadaran kritis, penguatan kapasitas perempuan, dan pembangunan solidaritas komunitas. Ruang partisipatif yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada keadilan sosial akan memungkinkan perempuan menjadi subjek aktif dalam proses transformasi desa. Dengan demikian, peran PKK perlu direvitalisasi agar tidak terjebak dalam formalitas semata, tetapi benar-benar berfungsi sebagai penggerak perubahan yang mengedepankan nilai keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab kolektif.

Mendorong Partisipasi Politik Perempuan Dalam Program PKK

Partisipasi politik perempuan dalam PKK tidak hanya penting untuk memperkuat peran perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga dan sosial, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap terciptanya keluarga yang sehat dan produktif. Keluarga yang sehat akan memiliki produktivitas yang lebih tinggi, baik secara ekonomi maupun sosial, sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan desa. Dalam konteks ini, keterlibatan aktif perempuan dalam PKK memegang peranan strategis karena perempuan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kebutuhan dasar keluarga dan pola asuh anak, yang menjadi fondasi utama kesehatan dan kesejahteraan keluarga. (Sudrajat, Syakdiah & Suwarjo, 2020).

Ketika keluarga-keluarga di desa tersebut berada dalam kondisi sehat dan produktif, desa sebagai unit komunitas juga akan menunjukkan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Hal ini mencakup peningkatan kualitas hidup warga serta kemampuan kolektif masyarakat untuk mengatasi berbagai tantangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, memperkuat partisipasi politik perempuan melalui PKK adalah langkah krusial untuk membangun sistem sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, PKK tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pemberdayaan keluarga, tetapi juga sebagai pendorong utama dalam menciptakan desa yang maju dan mandiri melalui sinergi antara kesehatan keluarga dan pembangunan desa. (Akbar, 2020).

Secara lebih luas, hubungan antara partisipasi politik perempuan, keluarga sehat, dan pembangunan desa menggambarkan pentingnya pendekatan holistik dalam pembangunan komunitas. Kesehatan keluarga yang baik adalah prasyarat bagi produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, sementara keterlibatan perempuan dalam politik lokal menjadi katalisator perubahan yang membawa perbaikan kualitas hidup secara menyeluruh. Oleh karena itu, penguatan kapasitas perempuan dalam PKK harus dipandang sebagai investasi strategis yang menghasilkan manfaat sosial-ekonomi jangka panjang bagi masyarakat desa.

Untuk memperkuat partisipasi politik perempuan dalam PKK dan mendukung tercapainya tujuan tersebut, diperlukan beberapa solusi strategis. Pertama, peningkatan kapasitas perempuan melalui pelatihan dan pendidikan politik yang berfokus pada peningkatan pemahaman tentang hak-hak politik, kepemimpinan, serta keterampilan advokasi. Kedua, pembentukan ruang dialog inklusif yang melibatkan perempuan secara aktif untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan keluarga dalam forum-forum PKK. Ketiga, pemanfaatan teknologi dan media sosial sebagai sarana komunikasi dan mobilisasi perempuan agar partisipasi politik dapat diperluas dan lebih mudah dijangkau. Keempat,

membangun kemitraan yang kuat antara PKK, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil guna mendukung pemberdayaan perempuan secara sistematis.

KESIMPULAN

Berangkat dari hasil penelitian di Desa Sampali menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan dalam program PKK masih bersifat pasif dan terbatas pada pelaksanaan kegiatan rutin seperti posyandu dan gotong royong, tanpa adanya inisiatif transformatif yang mendorong kesadaran kritis dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan strategis. Padahal, perempuan memiliki peran sentral dalam memahami kebutuhan ekonomi keluarga dan pendidikan anak, yang menjadi fondasi utama keluarga sehat dan sejahtera. PKK Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan menyatakan untuk siap dan mendukung adanya perlibatan partisipasi politik perempuan melalui pembukaan ruang aspirasi melalui kegiatan musyawarah yang diselenggarakan. Untuk itu, penguatan peran PKK sebagai ruang partisipatif harus diarahkan pada peningkatan kapasitas melalui pelatihan kepemimpinan, pendidikan politik komunitas, serta upaya sosialisasi yang berkelanjutan mengenai pentingnya peran politik perempuan dalam pembangunan desa. Di samping itu, pemanfaatan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram dapat menjadi sarana strategis untuk memperluas akses informasi, memperkuat komunikasi, membangun jaringan, serta menyuarakan aspirasi perempuan secara lebih luas. Melalui pendekatan ini, perempuan di Desa Sampali diharapkan mampu tampil sebagai subjek aktif dalam proses pembangunan yang adil, demokratis, dan berorientasi pada pemberdayaan komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, H. (2020). Hubungan Karakteristik Ibu terhadap Praktik Keluarga Sehat (Studi Kasus di Desa Muntoi Kabupaten Bolaang Mongondow). *Infokes*, 10(1), 214-218.
- Al-fajar, M. F. (2023). Dampak Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Ekonomi Kreatif Terhadap Peningkatan Ekonomi Di Desa Dayeuhwangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka (Bachelor's thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Aprilia, J. (2022). Strategi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Pemberdayaan Perempuan di Desa Tanjung Keranjang Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa" APMD").
- Faulks Keith (2010). *Sosiologi politik pengantar kritis*. Bandung: Nusa Media.
- Lestari, D. (2016). Eksistensi Perempuan Dalam Keluarga (kajian peran perempuan sebagai jantung pendidikan anak). *Muwazah*, 8(2), 258-267.
- Maharani, I. S., Nugraha, A., & Pratama, R. K. (2024). Optimalisasi Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Membangun Kesetaraan Gender. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 5(3), 3042-3048.
- Muslikhati, S. (2004). *Feminisme dan pemberdayaan perempuan dalam timbangan Islam*. Gema Insani.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 36 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- Rokhmansyah, A. (2016). *Pengantar gender dan feminisme: Pemahaman awal kritik sastra feminisme*. Garudhawaca.
- Susanti, E. D., Siagian, N., & Siregar, H. (2023). Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Meningkatkan Kualitas Perempuan Di Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 3(1), 106-122.